

Kaum Muda sebagai Agen Demokrasi Digital: Analisis Peran Teknologi dalam Partisipasi Politik Generasi Digital Menurut Christian Fuchs

Cosmas Buru

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Hendrikus Balzano Japa

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Matias Patriano Vano

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Ronaldo Musi

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Email: ronaldomusi805@gmail.com

Viktorinus Edison

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Recieved: 15 Juli 2025 ; Revised: 04 Oktober 2025 ; Published: 22 Oktober 2025

Abstract

The focus of this paper is to examine the life of young people within the political sphere amid the rapid advancement of digital media. It discusses the participation of youth (Generation Z) in utilizing digital devices to engage directly in fostering a more democratic society. The study is grounded in the critical thought of Christian Fuchs, an Austrian philosopher and sociologist. Fuchs emphasizes the crucial role of digital media as a new space of encounter in contemporary times, especially for the younger generation. He argues that digital media may either strengthen or undermine the existence of democracy in politics, depending on how users employ it wisely and responsibly. In this context, young people hold a decisive role in enhancing the quality of democracy within the dynamic transformation of digital media and its features. Upon the shoulders of the youth rests the responsibility of navigating

these changes; upon their engagement depends the very substance of democracy itself, which may be expanded through online activities, particularly in advancing critical and constructive public opinion to challenge governmental policies that deviate from the principles of the common good. This study employs a qualitative method and a literature review based on Christian Fuchs's theoretical framework. The findings highlight that, in the midst of the transformations brought about by digital media and the algorithms embedded within it, strengthening digital literacy education among young people is indispensable, so that they may become responsible agents in the use of digital media.

Keywords: Democracy; Youth; Digital Media; Politics; Public Sphere

Abstrak

Fokus tulisan ini adalah menelaah kehidupan kaum muda dalam dunia politik di tengah derasny kemajuan media digital. Tulisan ini membahas partisipasi kaum muda (Gen Z) dalam menggunakan *gadgad* untuk berpartisipasi secara langsung menuju kehidupan yang lebih demokratis. Tulisan ini didasarkan pada pemikiran kritis Christian Fuchs seorang filsuf sekaligus sosiolog asal Austria. Fuchs melihat peran penting media digital sebagai ruang perjumpaan yang baru bagi siapa pun pada zaman ini terutama kaum muda. Ia berpendapat bahwa media digital akan sangat berguna atau justru merusak keberadaan demokrasi dalam dunia politik tergantung bagaimana pengguna memakainya secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kaum muda memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri di tengah derasny arus perubahan media digital dengan fitur-fitur yang ada. Di pundak kaum muda, arus perubahan itu diletakkan. Di pundak kaum muda mutu demokrasi itu sendiri menjadi dasar untuk memperluas jangkauan demokrasi melalui kegiatan-kegiatan *online* terutama memajukan opini-opini publik yang bernuansa kritis dan membangun untuk menolak kebijakan pemerintah yang menyimpang dari konsep kehidupan bersama. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan kajian daftar pustaka berdasarkan kajian pemikiran Christian Fuchs. Temuan dari tulisan ini ialah bahwa di tengah arus perubahan media digital dan algoritma-algoritma yang termuat di dalamnya sangat penting untuk meningkatkan pendidikan literasi digital untuk kaum muda agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menggunakan media digital.

Kata Kunci: Demokrasi; Kaum Muda; Media Digital; Politik; Ruang Publik

1. Pendahuluan

Perkembangan dan transformasi teknologi digital, khususnya internet, kecerdasan buatan AI, dan berbagai platform media sosial, seperti *Facebook*,

Toutube, Twitter (X), Instagram, Google, Apple, Amazon, Baiudu, WhatsApp, Wechat, Alibaba, Spotify, Netflix, Telegram, Tiktok, Meta, dan masih banyak lainnya, telah merevolusi cara individu berkomunikasi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Perubahan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga politis, karena menciptakan bentuk-bentuk baru keterlibatan warga negara yang tidak selalu dimediasi oleh institusi formal.¹ Marc Prensky menyebut generasi muda sekarang sebagai *digital natives* yaitu menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan ruang digital untuk menyuarakan pendapat, membentuk opini, dan bahkan memobilisasi aksi sosial-politik secara daring dan luring.²

Di Indonesia, fenomena konkret dari partisipasi politik digital kaum muda, misalnya, dalam gerakan #ReformasiDikorupsi tahun 2019. Ribuan mahasiswa dan aktivis muda menggunakan media sosial seperti Twitter dan Instagram untuk mengkritik revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP yang dinilai mengancam demokrasi.³ Platform digital bukan hanya dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi alternatif, tetapi juga untuk mengorganisasi massa dan menyalurkan informasi secara cepat dan masif. Hal serupa terjadi dalam *Black Lives Matter* di Amerika Serikat yang menunjukkan bagaimana media sosial menjadi alat strategis bagi generasi muda dalam memahami aspirasi politik global.⁴ Meskipun membuka peluang demokratisasi, ruang digital juga menyimpan paradoks. Media sosial yang tampak bebas dan terbuka sesungguhnya dikendalikan oleh logika algoritmik dan ekonomi pasar kapitalistik yang dapat mempersempit ruang deliberasi publik. Dalam konteks inilah, partisipasi politik generasi muda perlu dilihat secara lebih kritis, apakah bentuk partisipasi ini memperkuat praktik demokrasi, benar-benar mencerminkan demokrasi yang substansial dan reflektif, atau justru bersifat dangkal dan rentan terhadap manipulasi struktur kekuasaan digital yang tidak transparan. Partisipasi digital generasi muda acap kali diwujudkan dalam bentuk ekspresi simbolik seperti menyukai (*like*), membagikan (*share*), atau mengunggah konten politik tertentu di media sosial. Aktivitas ini dikenal sebagai *slacktivism*, yaitu keterlibatan minimal yang tidak selalu diikuti dengan aksi politik nyata di dunia offline.⁵

¹ Christian Fuchs, "The Digital Commons and the Digital Public Sphere: How to Advance Digital Democracy Today," *Christian Fuchs* 1, no. 16 (n.d.): 9–26.

² Marc Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants," *On the Horizon* 9 no. (2001): 1–6.

³ Siti Aisah, "Aktivisme Digital Mahasiswa Dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* Vol. 3 No. (2020): 134–50.

⁴ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*, 3rd ed. (London: SAGE Publications, 2021) 259 – 260.

⁵ Evgeny Morozov, *To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism* (New York: PublicAffairs, 2013).

Contoh nyata dapat dilihat dalam gerakan #BlackOutTuesday pada tahun 2020, jutaan pengguna Instagram, termasuk kaum muda Indonesia, mengunggah kotak hitam sebagai simbol solidaritas terhadap gerakan *Black Lives Matter*. Namun, gerakan ini juga dikritik karena bersifat simbolik dan mengaburkan informasi penting yang dibutuhkan untuk aksi nyata.⁶ Dalam konteks Indonesia, tren serupa terlihat dalam maraknya penggunaan tagar politik seperti #TolakOmnibusLaw, walaupun viral di media sosial, namun tidak selalu mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diangkat.

Selain itu, algoritma media sosial seperti yang diterapkan oleh TikTok, Facebook, Twitter (X), Youtube, dan Instagram cenderung mengutamakan konten yang bersifat emosional, sensasional, dan cepat viral, dari pada konten edukatif atau argumentatif.⁷ Akibatnya, ruang diskusi publik digital cenderung terfragmentasi, dangkal, dan terjebak dalam “*echo chamber*”, yakni pengguna hanya terekspos pada pandangan yang serupa. Hal ini berisiko memperlemah kualitas deliberasi politik dan menciptakan ilusi partisipasi bahwa ternyata dikontrol oleh logika pasar kapitalisme digital. Dalam pandangan Christian Fuchs, demokrasi digital bukan sekadar soal keberadaan teknologi atau jumlah interaksi daring, tetapi tentang kualitas partisipasi yang kritis, setara, dan tidak dimediasi oleh kekuatan pasar atau algoritma korporat.⁸ Karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis apakah generasi digital sungguh menjadi subjek aktif yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas demokrasi, atau justru menjadi objek pasif dalam sistem digital yang kapitalistik dan hegemonik.

Christian Fuchs, seorang pemikir terkemuka dalam ekonomi politik media digital, menyuguhkan kerangka kritis untuk memahami bagaimana teknologi informasi membentuk dinamika kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan *Critical Political Economy of Communication*, Fuchs mengawinkan pemikiran Karl Marx tentang kapitalisme dan alienasi dengan teori ruang publik deliberatif Jürgen Habermas, untuk menunjukkan bahwa demokrasi digital bukan sekadar keterlibatan daring (*online engagement*), tetapi harus mencerminkan prinsip partisipasi yang setara, reflektif, dan terbebas dari hegemoni pasar.⁹ Fuchs menekankan bahwa media digital, khususnya media sosial dan berbagai

⁶ Brian X. Chen, “Posting a Black Square Was Easy. Understanding Why Was Hard,” *The New York Times*, 10 Juni 2020.

⁷ Zeynep Tufekci, *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest* (New Haven: Yale University Press, 2017) 53 – 55.

⁸ Christian Fuchs, *Digital Democracy and the Digital Public Sphere* (London: Routledge, 2023) 5 -7.

⁹ Fuchs. 3 - 7

platform di dalamnya, bukanlah ruang netral. Platform-platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter dimiliki oleh korporasi global (seperti Meta dan X Corp) yang mengoperasikan algoritma berdasarkan logika akumulasi kapital dan monetisasi data.¹⁰ Dalam konteks ini, generasi muda yang menjadi pengguna dominan platform digital justru berisiko terjebak dalam relasi produksi kapitalistik yang menjadikan aktivitas mereka sebagai bentuk *unpaid digital labour*.¹¹

Namun demikian, Fuchs juga melihat adanya potensi emansipatoris. Ia mencontohkan gerakan *Occupy Wall Street* dan *Arab Spring*, kaum muda memanfaatkan media digital untuk membangun ruang publik alternatif yang menantang narasi dominan.¹² Potensi ini juga tampak dalam konteks Indonesia, misalnya saat mahasiswa menggunakan media sosial untuk mengorganisasi demonstrasi #ReformasiDikorupsi tahun 2019 dan gerakan #TolakOmnibusLaw tahun 2020. Dalam gerakan tersebut, media digital bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang artikulasi politik yang memperkuat solidaritas dan aksi kolektif. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis kritis wacana berdasarkan kerangka ekonomi politik kritis media Christian Fuchs. Sumber utama terdiri dari karya-karya Fuchs seperti *Digital Democracy and the Digital Public Sphere* (2023), *SocialMedia: A Critical Introduction* (2021), dan *Digital Labour and Karl Marx* (2014), dibaca secara kontekstual untuk memahami dinamika partisipasi politik kaum muda dalam ruang digital yang dikendalikan logika kapitalisme platform.¹³

Beberapa penelitian terdahulu telah menelaah partisipasi digital generasi muda. Lim, misalnya, dalam penelitiannya tentang gerakan #ReformasiDikorupsi, menunjukkan bagaimana media sosial digunakan untuk mobilisasi politik berbasis isu, namun juga menyoroti tantangan disinformasi dan represi digital.¹⁴ Sementara itu, Peter Dahlgren dalam *Media and Political Engagement* menyoroti pentingnya *civic agency* di era digital, namun mengingatkan bahwa tidak semua bentuk partisipasi digital bersifat deliberatif atau transformatif.¹⁵ Studi lain dari Theocharis dan van Deth menggarisbawahi

¹⁰ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019). 8 – 10.

¹¹ Christian Fuchs, *Digital Labour and Karl Marx* (London: Routledge, 2014) 114 – 117.

¹² Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*. 3rd ed. (London: SAGE Publications, 2021) 260 – 265.

¹³ Fuchs, *Digital Democracy and the Digital Public Sphere*. (London: Routledge, 2023).

¹⁴ Merlyna Lim, “‘Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia,’” *Critical Asian Studies* 52 no 1 (2020): 1–22.

¹⁵ Peter Dahlgren, *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

munculnya “*politics without politics*” di kalangan muda, yaitu bentuk-bentuk ekspresi politik yang bersifat ringan dan simbolik.¹⁶

Fokus tulisan ini adalah pada analisis peran strategis kaum muda sebagai agen demokrasi digital, dengan mengkaji bagaimana teknologi membentuk dan dibentuk oleh praktik partisipasi politik generasi digital, khususnya dalam konteks media sosial sebagai ruang artikulasi publik. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep demokrasi digital dalam perspektif Christian Fuchs, mengkaji praktik partisipasi politik generasi digital melalui media sosial, dan mengevaluasi apakah partisipasi tersebut bersifat emansipatoris atau justru direduksi oleh logika kapitalisme digital dan algoritmisasi informasi. Temuan awal menunjukkan bahwa generasi muda berperan penting dalam menghidupkan ruang publik digital, seperti terlihat dalam gerakan #TolakOmnibusLaw (2020) yang menggabungkan kritik politik dengan kreativitas budaya populer. Namun, potensi demokratis ini kerap terancam oleh bias algoritmik, *clicktivism*, dan dominasi platform yang bersifat eksploitatif terhadap data pengguna.¹⁷

Penelitian ini memiliki relevansi teoretis dan praktis yang kuat. Secara teoretis, penelitian ini mendalami peran generasi digital sebagai aktor politik dalam ruang yang dibentuk oleh logika kapitalisme digital. Secara praktis, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana kaum muda mampu mengartikulasikan kepentingan demokratis dalam media yang tidak sepenuhnya bebas dan netral. Penelitian ini juga berkontribusi pada upaya merumuskan strategi demokratisasi teknologi yang berbasis pada prinsip kesetaraan, reflektivitas, dan keadilan sosial. Studi ini menyuguhkan kerangka teoretis kritis untuk membaca peran kaum muda dalam demokrasi digital dari sudut pandang ekonomi politik media. Dengan demikian, tulisan ini memperkaya diskursus tentang demokratisasi teknologi serta membuka jalan bagi praktik politik digital yang lebih setara, reflektif, dan transformatif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Kajian pustaka dipilih karena fokus penelitian ini adalah menelaah pemikiran Christian Fuchs mengenai demokrasi digital serta mengkontekstualisasikannya dalam dinamika partisipasi politik kaum muda di era media sosial. Melalui metode ini, penulis menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber primer maupun sekunder yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun publikasi akademik yang

¹⁶ Yannis Theocharis and Jan W. van Deth, *Political Participation in a Changing World: Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Citizen Engagement* (New York: Routledge, 2017).

¹⁷ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (New York: PublicAffairs, 2019).

membahas demokrasi digital, media sosial, serta partisipasi politik generasi muda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kritis wacana yang menekankan bagaimana teks, wacana, dan praktik komunikasi digital membentuk relasi kuasa dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena partisipasi digital kaum muda, melainkan juga menganalisisnya secara kritis dalam kaitannya dengan logika kapitalisme digital dan tantangan demokrasi kontemporer.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Konsep Demokrasi Digital Christian Fuchs

Gagasan demokrasi digital Christian Fuchs berakar pada pendekatan **teori kritis** yang menolak pandangan teknologis yang netral terhadap media digital. Fuchs menekankan bahwa demokrasi digital sejati tidak cukup hanya diukur dari tersedianya akses ke media sosial atau internet, melainkan dari struktur kekuasaan dan ekonomi politik yang melingkupinya. Menurutnya, demokrasi digital harus bersifat partisipatoris, inklusif, dan terbebas dari dominasi kapitalisme digital. Artinya, demokrasi digital bukan hanya soal siapa yang bisa berbicara di media sosial, tetapi apakah mereka dapat terlibat secara bermakna dalam proses deliberasi dan pengambilan keputusan politik. Fuchs mengkritik bagaimana media sosial seperti Facebook dan Twitter cenderung mendorong komodifikasi komunikasi dan mempersempit demokrasi hanya sebatas keterlibatan formal atau ekspresif semata. Ia menggunakan kerangka Habermasian tentang ruang publik (*public sphere*), tetapi menekankan bahwa ruang publik digital saat ini dimiliki dan dikendalikan oleh korporasi, bukan oleh warga negara.

Dalam *Digital Democracy and the Digital Public Sphere*, Fuchs menyatakan bahwa bentuk demokrasi digital yang ideal membutuhkan struktur ekonomi alternatif yakni media digital dikembangkan dan dikelola sebagai *commons* atau ruang bersama yang dikontrol secara demokratis oleh publik. Dengan kata lain, demokrasi digital menurut Fuchs tidak akan terwujud secara substantif tanpa transformasi radikal dalam kepemilikan dan kendali atas infrastruktur komunikasi digital. Ia juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital yang kritis. Konteks, generasi muda, tidak bisa dinilai secara otomatis sebagai aktor demokratis hanya karena mereka aktif di media sosial. partisipasi mereka harus bersifat reflektif, sadar politik, dan berorientasi pada keadilan sosial.¹⁸ Melalui pendekatan ekonomi politik Marxis, Fuchs menyandingkan demokrasi digital dengan perjuangan kelas di era informasi. Ia menyoroti tajam dan kritis platform digital sebagai ruang

¹⁸ Fuchs, *Digital Democracy and the Digital Public Sphere*. (London: Routledge, 2023) 45 – 72.

konflik antara kepentingan kapitalisme platform (*platform capitalism*) dan aspirasi demokratis rakyat. Karena itu demokrasi digital bukan hanya tentang kebebasan berekspresi, tetapi juga tentang redistribusi kekuasaan dan kepemilikan media digital kepada rakyat.¹⁹

Christian Fuchs membangun pemikirannya tentang demokrasi digital dalam kerangka ekonomi politik kritis, terutama berlandas pada teori Marxis, teori ruang publik Habermasian, dan semangat demokrasi partisipatoris. Dari berbagai karya utamanya, berikut adalah lima poin substansial yang menjadi dasar demokrasi digital versi Fuchs. *Pertama*, keadilan dalam akses dan partisipasi. Fuchs menegaskan bahwa demokrasi digital bukan soal akses terhadap media digital saja, tetapi juga kapasitas untuk menggunakan, memahami, dan mengartikulasikan teknologi secara kritis. Demokrasi digital sejati adalah ketika semua warga negara memiliki kesetaraan dalam mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi, serta dalam pengambilan keputusan politik melalui media digital. *Kedua*, perlawanan terhadap kapitalisme digital. Fuchs mengkritik keras model bisnis kapitalisme platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, yang memanipulasi keterlibatan politik melalui algoritma berbasis profit. Ia menilai media digital saat ini menciptakan ilusi partisipasi demokratis, kenyataan sesungguhnya dikendalikan oleh logika akumulasi kapital. *Ketiga*, penguatan ruang publik digital. Dengan mengadaptasi teori Habermas, Fuchs menekankan bahwa media digital harus menjadi ruang publik sejati yang bebas dari sensor pasar dan negara. Ruang publik digital harus memprioritaskan diskusi rasional, kesetaraan suara, dan deliberasi kolektif sebagai fondasi pengambilan keputusan.²⁰

Keempat, pengelolaan media digital sebagai *commons*. Fuchs mendorong pendekatan alternatif dalam kepemilikan media digital, bukan sebagai properti privat, tetapi sebagai *commons* atau milik bersama. Artinya, platform digital seharusnya dikelola secara demokratis, baik oleh publik maupun komunitas, bukan oleh korporasi transnasional. *Kelima*, kritis terhadap partisipasi permukaan. Fuchs mengingatkan bahwa ekspresi politik di media sosial, seperti memberi “like”, menggunakan tagar, atau membagikan konten, tidak serta-merta berarti partisipasi yang substansial. Demokrasi digital menuntut keterlibatan kritis, reflektif, dan transformatif, bukan sekadar aktivisme simbolik (*clicktivism*).

¹⁹ Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*. 3rd ed. (London: SAGE Publications, 2021), 45 – 80.

²⁰ Fuchs, *Digital Democracy and the Digital Public Sphere*, (London: Routledge, 2023) 45 – 86.

Studi “*Kaum Muda sebagai Agen Demokrasi Digital*” sangat relevan dengan pemikiran Christian Fuchs. Generasi muda adalah aktor dominan dan aktif dalam media sosial dan konsumsi digital, tetapi pertanyaan krusialnya adalah: apakah mereka juga mampu menjadi agen transformasi demokrasi digital, sebagaimana didefinisikan Fuchs. Dalam lanskap Fuchs, kaum muda bisa menjadi agen demokrasi digital manakala mereka mampu, *satu*, mengkritisi struktur kapitalisme digital yang membentuk algoritma media sosial; *dua*, menyadari bahwa ruang publik digital harus diperjuangkan secara kolektif; *tiga*, melibatkan diri dalam produksi konten politik yang deliberatif dan reflektif, bukan hanya mengikuti tren viral; dan *empat*, mendorong perubahan sistemik dalam pengelolaan media digital agar lebih demokratis. Karena itu studi ini akan menguji, apakah generasi muda hari ini benar-benar menjadi subjek demokrasi digital, atau hanya objek dalam sistem yang digerakkan oleh logika kapitalisme platform?²¹

3.2 Karakteristik Generasi Digital dan Kecenderungan Politikanya

Generasi merupakan suatu kelompok individu yang lahir dan besar di era di mana teknologi digital mendominasi kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki tingkat keterampilan teknologi yang tinggi, keterhubungan yang kuat dengan internet dan media sosial, serta cenderung untuk mengadopsi perubahan teknologi dengan cepat. Generasi digital sering diidentifikasi dengan kebiasaan menggunakan perangkat digital dan aplikasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga interaksi sosial. Generasi digital dan pengaruh teknologi serta media sosial dalam pembentukan karakter individu dapat mencakup beberapa aspek yang penting.²² Hal mendasar yang tampak dari perilaku generasi digital adalah bagaimana caranya untuk bisa diakui dan diterima dengan menggunakan platform-platform media sosial untuk membuat konten.

Generasi digital adalah generasi yang hidup dan bertumbuh di tengah arus kemajuan teknologi. sesuai dengan konteks kehidupan yang dialami, kaum muda (generasi digital) tidak bisa melepaskan diri dari setiap peristiwa setiap hari apalagi jika hal tersebut berhubungan langsung dunia media sosial. Di tengah kemajuan teknologi dan media, generasi digital memiliki kecenderungan untuk terus *update* di media sosial.

Update di media sosial bagi generasi digital adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi setiap hari. Sangat dimungkinkan bahwa perilaku eksis di media sosial bagi kaum muda merupakan sebuah banalitas yang bersifat ambivalen.

²¹ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*, (London: Routledge, 2023) 45 & Fuchs, *Digital Labour and Karl Marx*, (London: Routledge, 2014), 207–209.

²² Asif Maulana Muhammad Anton, “Aksi Generasi Digital Yang Berkarakter Dan Toleran,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 SE-Articles (2024): 679–686.

Pada satu sisi, Generasi Z harus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi sehingga dengan sendirinya mereka mengathui lebih banyak fenomena-fenomena yang terjadi setiap hari. Media sosial memungkinkan kaum muda digital untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, eksis di media sosial, menjadikan kaum muda di era digital tidak memiliki pegangan yang kuat untuk menghadapi situasi yang akan terjadi selanjutnya. Di samping itu, ada juga kemungkinan lain bahwa kaum muda di era media digital kurang memaknai konteks kehidupan di mana sebenarnya mereka berada dan sangat disayangkan bahwa kehidupan itu sendiri sebenarnya telah dikendalikan oleh platform media sosial.

Tanpa demikian, generasi Z akan merasa ada yang tidak lengkap. Berbagai macam platform media sosial secara psikologis merasa diterima oleh orang lain. Melalui *Tik-Tok*, *WhatsApp*, *You Tube*, *Instagram*, *Facebook* generasi Z ingin diakui dengan konten-konten yang upload setiap hari. Lanskap media sosial yang dinamis telah merevolusi cara individu berinteraksi, berbagi informasi, dan mengonsumsi konten. Generasi Z, generasi pertama yang benar-benar "asli digital", memiliki karakteristik dan perilaku unik yang secara signifikan memengaruhi keterlibatan mereka dengan media sosial.²³ Dalam konteks politik, media sosial cenderung memperkuat karakter seseorang sebagai pribadi yang menutup diri terhadap kemunafikan. Ironisnya bahwa tidak sedikit kaum muda yang menyalahgunakan media digital di tengah pusaran politik yang sewaktu-waktu dapat memecah-belah masyarakat.²⁴

Hipokrisi politik di era demokrasi digital merupakan suatu keniscayaan dan sekaligus anomali. Dikatakan demikian, karena sejatinya era demokrasi digital melahirkan proses kontestasi elektoral yang makin demokratis, rasional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Muaranya Pemilu melahirkan politisi-politisi jujur, jauh dari hipokrisi dan kemunafikan politik. Yang bekerja untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat dan bangsa. Anomalinya justru banyak terjadi sebaliknya. Yakni: demokrasi elektoral disalahgunakan melalui berbagai cara. Antara lain survei-survei elektoral yang bias kepentingan penyandang dana, fabrikasi dan manipulasi *digital branding*, pemanfaatan Media Sosial sebagai ajang *black campaign*, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan sebagainya. Akibat negatifnya, Pemilu menghasilkan cukup banyak politisi hipokrit sebagai pemenangnya. Dimana setelah berada

²³ Shubhangi Jain -, "The Impact of Social Media Content on Gen Z Engagement: A Comprehensive Analysis," *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 4 (August 15, 2024), <https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=26194>.

²⁴ David Runciman. Ter. Toni Setiawan, *Politik Muka Dua (Topeng Kekuasaan Dari Hobbes Hingga Orwell)*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

di lanskap kekuasaan, mengkhianati amanah atau kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya.²⁵

Dalam konteks politik di Indonesia terutama beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi banyak pergesekan dan perdebatan antara beberapa kelompok yang berbeda keyakinan dan entah apa yang melatarbelakangi perdebatan-perdebatan tersebut sehingga belum dapat diketahui. Namun tentunya hal ini menimbulkan keresahan serta ketidaknyamanan di kalangan masyarakat digital di sebagian wilayah Indonesia. Selanjutnya pada pasca pilgub 2017, dimana waktu itu isu-isu terkait keagamaan dimainkan di media sosial yang tidak lain untuk tujuan politik membuat gaduh kalangan masyarakat digital sehingga sedikit tidaknya mempengaruhi kontestasi politik pada masa itu.

Tampaknya setelah berakhirnya kontestasi tersebut masih cukup menarik untuk dimainkan di media sosial. Meski tidak semasif dulu, cara-cara tersebut bahkan diadopsi ke daerah-daerah yang akan atau sedang melakukan kontestasi. Cara-cara tersebut merupakan penyebaran berita bohong (palsu), ujaran kebencian, rasisme (doktrin), kampanye hitam dan lain-lain.²⁶ Memang dalam hal tersebut yang paling buming dimainkan adalah isu agama. Isu agama ini menjadi pemantik dalam kegaduhan yang cukup ampuh meningkatkan sentiment dari setiap kalangan umat beragama di Indonesia.²⁷

3.3 Media Sosial sebagai Media Partisipasi Politik

Secara sederhana, istilah media sosial bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana selama ini banyak diketahui. Menurut Van Dijk, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.²⁸ Di samping itu, media sosial juga memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh media-media konvensional. Di sisi lain, David Runciman membahas peran media sosial dalam konteks pengaruhnya terhadap demokrasi, politik, dan masyarakat. Dalam karyanya, media sosial dipahami sebagai platform digital interaktif yang memungkinkan

²⁵ Achmad Fachrudin, "Hipokrisi Politik Dalam Lanskap Kekuasaan Di Indonesia Anomali Dan Otokritik Demokrasi Digital," *Jurnal Deliberatif* 1, no. 1 (2024): 36–50.

²⁶ Kamaludin Yusra et al., "Structure and Features of Politically-Invested Hoaxes," in *Proceedings of the 1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), <https://www.atlantispress.com/article/125943818>.

²⁷ Anton, "Aksi Generasi Digital Yang Berkarakter Dan Toleran."

²⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perpektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi)*, ed. Nunik Siti Nurbaya, 1st ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

individu untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan terhubung secara instan, namun juga membawa konsekuensi besar bagi struktur sosial dan politik.²⁹

Media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapatnya dan memperluas partisipasi politik. Namun, media juga menjadi tempat di mana polarisasi, misinformasi, dan manipulasi politik tumbuh subur. Menurut Runciman, media sosial sering disebut sebagai alat pemberdayaan demokrasi, tetapi ironisnya, media sosial dapat merusak fondasi demokrasi melalui penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulasi opini publik.³⁰ Dapat dimengerti bahwa, media sosial adalah sarana yang sangat penting dalam proses demokrasi yang berciri ambivalen. Di satu sisi, media sosial menawarkan peluang besar untuk memperluas partisipasi publik dan memperkaya demokrasi. Namun di sisi lain, media sosial juga membawa risiko serius, termasuk manipulasi data, polarisasi politik, dan penurunan kualitas diskusi publik. Media sosial menjadi elemen krusial dalam memahami dinamika demokrasi kontemporer.³¹

Dalam konteks politik di Indonesia, peran media sosial dalam politik telah menjadi sangat populer saat ini. Indonesia termasuk negara keempat di dunia yang mengalami perubahan signifikan dalam meningkatkan transformasi politik, terutama di kalangan kaum muda. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, generasi muda mencapai 34,45% dari total populasi Indonesia. Mereka juga merupakan pengguna media sosial yang aktif. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Informasi (APJII) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 96% generasi muda di Indonesia menggunakan internet, dan 92% di antaranya aktif menggunakan media sosial. Platform seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* telah menjadi ruang publik virtual di mana generasi muda terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu.³²

Hal ini hendak mendeskripsikan bahwa kehadiran media sosial dalam ruang lingkup politik telah mengubah cara masyarakat untuk berpartisipasi

²⁹ David Runciman, "What Is Realistic Political Philosophy?," in *The Pursuit of Philosophy* (Wiley, 2012), 57–68, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118295212.ch4>.

³⁰ David Runciman, "Rescuing Democracy in the Age of the Internet," *Ethics & International Affairs* 29, no. 3 (September 2015): 331–344, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0892679415000271/type/journal_article, 24.

³¹ David Runciman, *The Politics of Good Intentions*, 1st ed. (United Kingdom: Princeton University Press: Princeton University Press, 2006), 90.

³² Nurul Fajri et al., "Transformasi Politik Di Indonesia: Analisis Terhadap Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik Generasi Muda," *Journal of Political Sphere* 5, no. 1 (June 30, 2024): 1–13, <https://jurnal.usk.ac.id/JPS/article/view/39517>.

dalam politik, khususnya bagi generasi muda, yang kini memiliki akses lebih luas untuk terlibat secara aktif dalam dinamika demokrasi. Melalui media sosial, kaum muda tidak hanya mengonsumsi atau sekedar penikmat informasi, tetapi juga penghasil gagasan dan agen perubahan yang mampu memobilisasi dukungan, menyebarkan narasi politik yang positif.

Meskipun media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda, ada juga beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi yang salah dan misinformasi. Sebuah studi oleh Litbang Kompas pada tahun 2020 menemukan bahwa 72% pengguna media sosial di Indonesia pernah terpapar informasi yang salah. Tantangan lainnya adalah potensi penyalahgunaan media sosial untuk tujuan politik. Pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 23.886 pelanggaran kampanye di media sosial. Terlepas dari tantangannya, media sosial memiliki potensi untuk mentransformasi partisipasi politik generasi muda di Indonesia.³³

3.4 Kaum Muda sebagai Produsen dan Konsumen Informasi Politik

Landasan pokok gagasan ini adalah teori demokrasi digital Christian Fuchs. Fuchs mengembangkan komunikasi kritis menggunakan media digital. Baginya media digital memiliki sumbangan sangat berharga. Media digital bukan hanya sekedar sebagai sarana untuk mengaktualisasi diri melainkan media digital dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi politik. Konteks ini memberikan ruang bagi peran kaum muda untuk mengeksplorasi sangat besar terutama mengenai media digital dan politik. Fuchs memandang peran kaum muda bukan hanya sebagai konsumen yang dapat mengonsumsi banyak informasi, namun juga sebagai produsen yang menghasilkan informasi politik dalam ruang lingkup media digital kontemporer. Dalam landscape media digital saat ini kaum muda dapat menciptakan informasi politik melalui berbagai jejaring media sosial, seperti *Tictok*, *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, *Google*, *Meta* dan berbagai media lainnya sehingga dapat menjadi konsumsi masyarakat digital.

Kaum muda sebagai konsumen informasi politik dilihat Fuchs masih dikendalikan oleh struktur kapitalisme digital. Dalam kerangka kapitalisme digital Fuchs mengkritisi platform media sosial yang menampilkan informasi politik dengan cara yang dikuasai oleh logika kapitalis, algoritma, dan komersialisasi sehingga terkesan ruang gerak kaum muda dibatasi karena dikontrol dan dikendalikan oleh penguasa. Dalam kerangka kerja kapitalisme digital yang terstruktur sistem informasi politik dipegang oleh penguasa yang

³³ Sri Lestari Wahyuningroem et al., "Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw," *F1000Research* 12 (April 25, 2024): 543, <https://f1000research.com/articles/12-543/v3>.

mempersulit kaum muda berselancar di berbagai platform media digital untuk menyebarkan informasi politik. Dalam situasi ini, kaum muda sebagai pengguna platform media digital hanya dijadikan sebagai objek eksploitasi. Kaum muda sebagai konsumen dijadikan komoditas yang didagangkan kepada periklanan bagi kapitalisme digital untuk meraup keuntungan. Di sini, terjadi komodifikasi konsentrasi jasa kaum muda menjadi produk komersial yang bisa diperjualbelikan dalam nilai tukar dan pasar terutama komodifikasi informasi digital. Pandangan ini didukung oleh kurangnya sumber daya kaum muda untuk memahami sistem kerja kapitalisme digital. Paradigma kapitalisme yang mendominasi karena kaum muda sebagai konsumsi informasi politik dibentuk oleh algoritma yang memperkuat preferensi mereka, sehingga mengerucutnya kesempatan membangun diskusi yang kritis, efektif dan reflektif.

Kaum muda sebagai konsumen informasi politik dalam platform media digital dalam cara kerja kapitalisme digital dianggap sebagai penerima informasi dan dikonsumsi begitu saja. Dengan demikian kaum muda dianggap pasif untuk menghasilkan informasi politik dalam platform media sosial. Fuchs melawan perepektif yang melihat orang-orang muda hanya pasif. Fuchs mengatakan bahwa meski konsumsi orang-orang muda dipengaruhi oleh kapitalisme digital, mereka juga dapat membangun *agency* dengan membuat keputusan; memilih, membagikan, mengkritik konten politik tertentu. *Agency* menurut Fuchs merujuk pada kapasitas pribadi atau kolektif untuk secara sadar dan reflektif bertindak dalam situasi sosial tertentu, terutama dalam hubungannya dengan struktur politik, teknologi, dan ekonomi.³⁴ Gagasan Fuchs tentang teori *agency* sangat penting untuk mengkritisi kekuasaan negara, media korporat, dan kapitalisme digital karena berusaha menyelaraskan *agency* pribadi, termasuk orang-orang muda dalam ranah media digital dan politik. Meskipun Fuchs berpendapat bahwa *agency* yang merujuk pada kemampuan individu tidak sepenuhnya bebas bertindak karena ruang gerak dibatasi oleh cara kerja kapitalisme digital yang sistematis, struktur sosial, dan ekonomi tetapi Fuchs tetap berkeyakinan bahwa setiap pribadi mempunyai kemampuan keputusan, merefleksikan situasi mereka, dan melakukan tindakan termasuk mengambil tindak politik. Dengan cara ini kaum muda tidak dianggap sebagai konsumen informasi politik yang pasif melainkan aktif. Aktif menyebarkan gagasan-gagasan politik yang membangun dan mencerahkan melalui media digital. Kaum muda dapat memilih membagikan konten-konten politik yang berkualitas dengan membangun dialog yang kritis, efektif, dan reflektif.

³⁴ Christian Fuchs, *Christian Fuchs, Foundations of Critical Media and Information Studies* (New York: Routledge, 2011).

Terang pemikiran Fuchs tentang *agency* berbasis kesadaran kritis. Artinya teori kesadaran kritis ini menekankan bahwa setiap pribadi tidak sekadar menerima informasi dan mengikuti tren yang bersifat implusif namun memiliki kesadaran kritis bahwa di balik mengikuti tren ada relasi kekuasaan yang menekan, mengontrol, dan mengendalikan, misalnya dalam platform media digital ada kapitalisme digital yang membuat akomodifikasi sesuatu atau orang sebagai produk komersial untuk diperdagangkan. Logika kapitalisme digital yang terstruktur membatasi pribadi-pribadi untuk mendapat keuntungan. Meskipun dibatasi oleh struktur seorang *agency* bisa mengambil tindakan perubahan sosial dengan menggerakkan kesadaran kolektif yang terorganisir. Konteks pemikiran Fuchs tentang *agency* berbasis kesadaran kritis, terbatas oleh struktur, berpotensi transformatif, *agency* juga dapat mengembangkan dialektis dengan struktur.³⁵ Artinya, *agency* dibatasi oleh struktur, namun *agency* bisa melakukan kritik terhadap dan mengubah struktur.

Agency dalam pandangan Fuchs dapat dihubungkan dengan kaum muda dalam dunia digital. dalam konteks media digital kaum muda mempunyai andil yang sanagt besar karena sebagai *agency*. Sebagai *agency* kaum muda dapat memanfaatkan media digital untuk menyampaikan orasi politik, megkritisi pemerintah, dan mensuport gerak-gerakan sosial. Namun, *agency* orang-orang muda tetap didominasi oleh *agency* kekuasaan yang membelokkan opini dan kritik terhadap kekuasaan karena media digital dikuasai oleh perusahaan teknologi terbesar seperti *Google*, *Meta* dan lainnya *via* algoritma, monetisasi dan sensor. Menurut Fuchs meskipun *agency* kaum muda dibatasi oleh kapitalisme digital, kaum muda adalah *agency* yang dapat menyuarakan suara kenabian yang menunjukkan kekuatan yang menekan struktur sosial, utamanya kapitalisme digital. Dalam konteks ini, Fuchs menekankan kesadaran kritis dan kesadaran kelompok supaya *agency* bisa sungguh-sungguh menciptakan perubahan sosial.

Kaum muda sebagai produsen informasi politik. Fuchs berpendapat bahwa dalam dunia digital saat ini, kaum muda tidak hanya sebagai penerima informasi digital secara pasif tetapi harus semakin aktif menjadi produsen konten politik yang aktif. Kaum muda sebagai produsen konten politik, aktif *via* jejaring media sosial, seperti *Twiter/X*, *Tictok*, *Youtube*, *Instragam*, *Facebook* dan sebagainya. Melalui platform media digital kaum muda dapat berpartisipasi sebagai produsen-konsumen (*prosumtion*). Dewasa ini para muda-mudi tidak hanya implusif atau mengikuti perkembangan teknologi tetapi juga menghasilkan atau memproduksi informasi melalui media elektronik; meme politik, video, opini, dan kampanye digital. Dengan ini

³⁵ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical* (London: Sage Publications, 2021).

kaum muda dapat terlibat dalam politik partisipatif. Mereka aktif mengikuti gerakan sosial, seperti BlackLivesMatter, *ReformasiDiskorupsi*, dan *Fridays for Future*) dengan menyampaikan narasi tandingan atas kapitalisme digital dan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, menurut Fuchs kaum muda memainkan peran ganda sebagai konsumen-produsen media digital, terutama sebagai konsumen dan produsen informasi politik. Meskipun memiliki peran ganda kaum muda tidak terlepas dari struktur kapitalisme digital dan kekuasaan negara. Karena itu, Fuchs menyampaikan perlu kesadaran kritis, pendidikan media, solusi media demokrasi supaya keterlibatan kaum muda sungguh-sungguh membawa perubahan sosial yang signifikan.

Teori kritis demokrasi digital dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Pandangan Fuchs dalam konteks Indonesia terbaca dalam peristiwa atau gerakan ReformasiDiskorupsi dan TolakOmnibuslaw. Kaum muda Indonesia menggunakan platform media digital untuk melawan dan memanejemen protes kebijakan pemerintah.³⁶ Menurut Datyka Widya Permata Yasih dan Andi Rahman Alamsyah dalam artikel “*The Paradox of Virtual Youth Politics*”, menyatakan bahwa aktivitas digital tidak selamanya dapat diwujudkan dalam transformasi realitas politik yang konkret. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) pada 2012 menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia 58,4 persen adalah rata-rata berusia 12-34 tahun sementara 14,4 persen pengguna internet berusia 25 dan 29 tahun.³⁷ Pada pemilu Presiden Indonesia 2014, pemuda Indonesia sebagai pemilih muda banyak menggunakan berbagai platform media sosial sebagai instrumen politik, dan saluran partisipasi politik. Jadi dalam pemilu Presiden 2014 kaum muda menggunakan teknologi berbasis web dan mobile dalam mempromosikan pendidikan politik dan keterlibatan. Banyak pemilih muda Indonesia menggunakan platform media digital seperti *Instragam*, *Twiter*, *Tictok*, *Youtube*, *Facebook*, blog untuk mendapatkan informasi politik, membagikan informasi politik, dan mempromosikan calon yang menjadi dukungan mereka serta untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi. Namun, kenyataannya mempertaruhkan informasi politik yang objektif dalam dunia nyata. Karena itu, Fuchs menyarankan kesadaran kritis dan pendidikan media sehingga konten politik

³⁶ Sri Lestari Wahyuningroem et al., “Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw,” *F1000Research* 12 (April 25, 2024): 543 <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>.

³⁷ Diatyka Widya Permata Yasih and Andi Rahman Alamsyah, “The Paradox of Virtual Youth Politics-Inside Indonesia: The Peoples and Cultures of Indonesia,” *Inside Indonesia* 2014, accessed May 27, 2025, <https://www.insideindonesia.org/the-paradox-of-virtual-youth-politics>.

yang diproduksi sungguh-sungguh objektif dan berbasis edukasi dan informasi politik yang diterima dari dunia digital dikritisi.

Menurut Ary Hermawan dalam artikel “*Fight For Your Freedom: Indonesian Online Civic Space Under Siege*” menegaskan bahwa penggunaan daring makin mengerut karena pemerintah menerapkan Undang-Undang ITE untuk mengendalikan dan membatasi kebebasan berekspresi. Hasil penelitian ini selaras dengan konsep dan kritik Fuchs bahwa pemerintah menggunakan teknologi untuk mengontrol dan memberi kesempatan bagi kelompok tertentu beroperasi dalam ruang digital. Menyempitnya ruang ekspresi digital karena Undang-Undang ITE maka kaum muda kehilangan kesempatan untuk menggunakan media untuk memproduksi informasi politik. Di sini kaum muda hanya sebagai konsumen media digital.³⁸ Menurut Fuchs perlu ada ruang digital bagi kaum muda untuk menyampaikan aspirasi politik yang membawa perubahan sosial yang progresif. Kesadaran kritis dan pendidikan media sangat penting untuk keterlibatan politik digital dan menghindari politik digital yang bersifat superfisial dan slactivism atau tindakan politik yang tidak transformatif dan nyata.

Dengan demikian Christian Fuchs sebagai seorang teorikus media dan komunikasi kritis, mengkritisi bahwa kaum muda adalah produsen dan konsumen informasi politik di era digital. Dalam tulisannya “*Social Media and the Public Sphere* (2014)” menyatakan bahwa media sosial adalah ruang publik yang bebas dan demokratis.³⁹ Dengan ini Fuchs mengkritisi media sosial yang seringkali dikuasai oleh kekuatan ekonomi dan politik yang membatasi keterlibatan publik. Dalam kritik ini Fuchs memberikan peluang bagi kaum muda untuk menciptakan diskusi dan menghasilkan konten-konten politik yang bermartabat, yang membela kebenaran. Hal ini dapat diciptakan lewat platform-platform media sosial. Namun, teori Fuchs mengaingatkan bahwa perlu adanya edukasi media dan mengembangkan kesadaran kritis karena media dikendalikan oleh hegemoni negara, kapitalisme digital, dan politik. Karena itu, kaum muda Indonesia di satu sisi mempunyai kapasitas besar sebagai agen transformasi via produksi dan konsumsi informasi politik di media digital. Namun, di sisi lain, kaum muda harus menyadari tantangan yang dihadapi sebagai *agency* produksi dan konsumen informasi berhadapan dengan sistem kapitalisme digital yang dikuasai oleh perusahaan besar seperti *Google*, *Meta* dan lainnya serta dikontrol oleh negara. Bagi Fuchs pendidikan

³⁸ Lisa Siregar, “Fight for Your Freedom: Indonesian Online Civic Space under Siege,” *The Jakarta Post*, last modified 2020, accessed May 27, 2025, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/27/fight-for-your-freedom-indonesian-online-civic-space-under-siege.html>.

³⁹ Viet Tho Le, Tuong-Minh Ly-Le, and Lam Ha, “Social Media and Political Participation” (2024): 49–68.

mendia yang kritis dan kesadaran akan struktur kekuasaan dalam ruang digital sangat urgen supaya dapat memastikan bahwa partisipasi kaum muda sungguh-sungguh memberi sumbangan bagi transformasi sosial yang progresif.

3.5 Tantangan Partisipasi Politik Digital: Disinformasi dan Aktivisme Klik

Partisipasi politik digital menjadi saluran utama bagi generasi muda atau *digital natives* dalam mengartikulasikan pendapat politik mereka. Platform seperti Twitter/X, Instagram, TikTok, dan YouTube telah memungkinkan kaum muda untuk mengakses informasi, menyuarakan opini, dan ikut serta dalam gerakan sosial-politik secara lebih langsung. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan serius, yakni disinformasi dan aktivisme klik (*clicktivism*). Disinformasi adalah penyebaran informasi yang salah secara sengaja untuk memanipulasi opini publik. Dalam konteks politik digital, disinformasi sering diproduksi dan disebarluaskan melalui algoritma media sosial yang mengutamakan *engagement* daripada kebenaran.⁴⁰ Hal ini, menunjukkan bahwa platform digital, dalam kerangka kapitalisme digital, mendorong *infotainment* dan viralitas sebagai nilai utama, sehingga narasi politik yang provokatif, manipulatif, dan emosional lebih mudah tersebar dibanding narasi berbasis fakta atau analisis kritis. Akibatnya, partisipasi politik digital rentan terhadap polarisasi dan penciptaan "ruang gema" (*echo chambers*) yang memperkuat bias individu dan melemahkan deliberasi rasional.⁴¹ Bagi kaum muda, ini menciptakan ilusi partisipasi seolah-olah mereka telah aktif secara politik hanya dengan menyukai, membagikan, atau mengomentari sebuah konten. Fenomena ini disebut sebagai aktivisme klik (*clicktivism* atau *slacktivism*). Ini mengacu pada partisipasi politik yang dangkal misalnya dengan menandatangani petisi daring atau mengubah foto profil dengan simbol gerakan tertentu tanpa keterlibatan nyata dalam aksi kolektif atau perubahan struktural.⁴² Fuchs mengkritik aktivisme klik karena ia hanya memperkuat logika pasar digital: setiap klik menjadi data yang dikomodifikasi oleh platform teknologi. Dalam logika kapitalisme digital, seperti yang dikritik Fuchs, aktivitas politik digital yang dangkal justru dimanfaatkan untuk menambah nilai kapital bagi platform digital, bukan untuk

⁴⁰ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction (Third Edition)* (London: SAGE Publications Ltd, 2021) 33-59.

⁴¹ Eli Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* (New York: Penguin Press, 2011) 3-24.

⁴² Evgeny Morozov, *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom* (New York: PublicAffairs, 2011) 66-94.

memperkuat demokrasi. Ini adalah bentuk alienasi baru, di mana partisipasi politik dikonsumsi sebagai *produk budaya* tanpa efektivitas politik nyata.

Pariser menjelaskan bahwa “filter bubble” membuat warga negara kehilangan akses terhadap informasi publik yang penting dan menurunkan kualitas deliberasi demokratis.⁴³ Dalam konteks ini, partisipasi politik yang seharusnya didasarkan pada pertukaran ide dan argumen yang terbuka justru terfragmentasi oleh logika algoritmik yang tidak demokratis. Selain itu, Evgeny Morozov dalam *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom* memperingatkan bahwa optimisme digital sering menutupi realitas politik yang kompleks. Ia menyebut bahwa internet bukanlah ruang netral, tetapi dapat digunakan oleh rezim otoriter maupun aktor oportunis untuk membentuk opini publik melalui disinformasi terstruktur dan manipulasi psikologis.⁴⁴ Dalam kerangka ini, aktivisme digital sering terjebak dalam apa yang disebut Morozov sebagai “illusion of engagement” ilusi bahwa keterlibatan minimal seperti menyukai atau membagikan konten setara dengan tindakan politik yang substansial. Ini mengaburkan batas antara keterlibatan simbolik dan perubahan sosial yang nyata, memperlemah esensi dari partisipasi politik sebagai bentuk keterlibatan kritis dan reflektif.

Dalam konteks ini, aktivitas politik digital seperti kampanye di media sosial bukan hanya kehilangan makna transformatifnya, tetapi juga dikomodifikasi menjadi data mentah untuk kepentingan iklan, pengawasan, dan profit. Maka, meskipun tampak partisipatif, media digital sering kali mereproduksi ketimpangan kekuasaan dan menciptakan bentuk baru dari ketidakberdayaan politik. Situasi ini menciptakan paradoks: di satu sisi, media sosial membuka ruang baru bagi kaum muda untuk bersuara, tetapi di sisi lain ruang ini dikuasai oleh struktur teknologis dan ekonomi yang mereduksi politik menjadi konsumsi. Untuk keluar dari jebakan aktivisme klik dan disinformasi, dibutuhkan intervensi struktural dan pendidikan politik yang membekali generasi digital dengan kemampuan berpikir kritis, keterampilan literasi media, serta keberanian untuk melakukan aksi politik nyata yang menuntut perubahan kebijakan, bukan sekadar perubahan status. Partisipasi politik digital yang sejati menuntut adanya keberlanjutan, organisasi kolektif, dan orientasi pada keadilan sosial bukan sekadar simbolisme daring.

Dalam *Digital Labour and Karl Marx*, Christian Fuchs menjelaskan bahwa kerja digital termasuk produksi konten oleh pengguna adalah bentuk kerja tidak dibayar (*unpaid labour*) yang menciptakan nilai bagi perusahaan.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, 27

⁴⁴ *Ibid.*, 70

⁴⁵ Christian Fuchs, *Digital Labour and Karl Marx* (New York & London: Routledge, 2014)117.

Artinya, bahkan ketika kaum muda secara sukarela membuat, membagikan, atau mengomentari konten politik, tindakan tersebut secara tak langsung dimanfaatkan oleh perusahaan digital untuk akumulasi kapital. Ini menegaskan bahwa bentuk keterlibatan digital yang tampak idealistis justru beroperasi dalam kerangka eksploitatif. Fuchs menyebut ini sebagai bentuk eksploitasi terselubung dalam ekonomi politik digital kontemporer. Selanjutnya, dampak psikologis dari aktivisme klik dan disinformasi juga tidak bisa diabaikan. Aktivitas politik yang bersifat dangkal dan cepat sering kali menghasilkan kelelahan emosional (*political fatigue*), di mana individu merasa telah cukup “berjuang” hanya dengan menunjukkan dukungan simbolik. Fenomena ini menyebabkan turunnya dorongan untuk melakukan aksi nyata seperti bergabung dengan organisasi, menghadiri diskusi publik, atau melakukan kampanye kebijakan. Dalam jangka panjang, ini mengarah pada atomisasi politik—kondisi di mana individu merasa terhubung secara digital namun terisolasi dalam tindakan kolektif. Jodi Dean, dalam konsep “*communicative capitalism*”, menggambarkan ini sebagai situasi ketika komunikasi politik di dunia digital menjadi sirkulasi pesan yang tak pernah menghasilkan efek transformatif dalam dunia nyata.⁴⁶

Dari sisi struktural, algoritma platform juga memperkuat hierarki visibilitas, yakni tidak semua suara memiliki peluang yang sama untuk terlihat atau terdengar. Konten yang menantang status quo atau tidak menarik secara komersial cenderung tenggelam dalam lautan informasi, sementara narasi sensasional dan polarisatif mendapatkan ruang utama. Fuchs menekankan bahwa ini merupakan bentuk kontrol ideologis yang halus namun efektif: bukan dengan menyensor, tetapi dengan mengubur.⁴⁷ Kaum muda yang aktif secara politik sering kali harus menyesuaikan kontennya agar sesuai dengan logika algoritmik, bukan dengan kebutuhan gerakan. Akibatnya, substansi politik dikorbankan demi visibilitas, dan gerakan sosial terperangkap dalam dinamika performatif. Akses yang tidak merata terhadap teknologi dan literasi digital juga memperparah ketimpangan dalam partisipasi politik digital. Kaum muda dari kelompok marjinal baik secara ekonomi, geografis, maupun kultural seringkali menghadapi hambatan dalam memanfaatkan ruang digital secara maksimal. Ini menimbulkan bentuk baru dari eksklusivitas politik, di mana hanya mereka yang memiliki akses dan pengetahuan digital yang cukup dapat berpartisipasi secara penuh.

Dalam *Social Media: A Critical Introduction*, Fuchs menyoroti bahwa demokrasi digital sejati memerlukan keadilan akses dan distribusi sumber

⁴⁶ Jodi. Dean, ““Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics,”” *Cultural Politics* 1 NO 1 (2005): DOI: <https://doi.org/10.1215/17432197-1-1-51> 51–74.

⁴⁷ Christian. Fuchs, *Communication and Capitalism: A Critical Theory* (London: University of Westminster Press, 2020).

daya digital, bukan hanya kebebasan berekspresi.⁴⁸ Tanpa ini, partisipasi politik digital akan tetap menjadi hak istimewa segelintir kalangan. Sebagai respons atas semua tantangan ini, pendidikan politik kritis berbasis media menjadi sangat mendesak. Literasi digital harus dikembangkan tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam dimensi etis, politik, dan struktural. Kaum muda perlu dilatih untuk mengenali bentuk-bentuk disinformasi, memahami cara kerja algoritma, serta menyadari bagaimana data mereka digunakan untuk kepentingan komersial. Ini sejalan dengan seruan Fuchs untuk mengembangkan “digital public pedagogy” sebagai strategi pembebasan dari kontrol kapitalisme digital. Pendidikan ini harus bersifat kolektif, dialogis, dan terhubung dengan aksi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa ruang digital tidak netral. Ia merupakan arena politik yang dibentuk oleh kekuatan ekonomi, ideologi, dan desain teknologis. Karena itu, transformasi partisipasi politik digital memerlukan pendekatan struktural dan politis, tidak cukup hanya dengan perubahan perilaku individu. Kaum muda sebagai agen demokrasi digital harus menuntut reformasi kebijakan platform, memperjuangkan keterbukaan algoritma, dan membangun ekosistem digital alternatif yang lebih adil dan demokratis. Tanpa ini, partisipasi mereka akan terus direduksi menjadi sekadar angka klik tanpa daya tawar politik yang sejati.

3.6 Kritik Cristian Fuchs Terhadap Kapitalisme Digital

Cristian Fuchs adalah salah satu tokoh utama dalam kajian teori kritis media digital. Ia membangun analisisnya berdasarkan teori Marxis, khususnya teori tentang kapitalisme, eksploitasi, dan alienasi, lalu menerapkannya pada konteks masyarakat digital kontemporer.⁴⁹ Fuchs mengkritik keras struktur kapitalisme digital yang mendasari platform seperti Facebook, Google, TikTok, dan Twitter/X. Menurut Fuchs, kapitalisme digital adalah bentuk lanjutan dari kapitalisme global di mana data, atensi, dan interaksi sosial menjadi komoditas utama. Dalam kerangka ini, kaum muda bukan hanya pengguna media sosial, tetapi juga *produsen nilai* tanpa disadari mereka memproduksi konten, data, dan perhatian yang dimonetisasi oleh korporasi digital raksasa.⁵⁰ Fuchs mengidentifikasi empat kritik utama terhadap kapitalisme digital: Eksploitasi Digital: Pengguna media sosial bekerja secara tidak sadar mereka menghasilkan data dan konten yang menguntungkan perusahaan teknologi tanpa mendapatkan kompensasi apa pun. Ini disebut

⁴⁸ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction* (London: SAGE Publications, 2017) 102.

⁴⁹ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction* (London: SAGE Publications, 2017) 125.

⁵⁰ Christian Fuchs, *Digital Labour and Karl Marx* (New York & London: Routledge, 2014) 1-22.

sebagai *digital labour*. Privatisasi Ruang Publik Digital: Platform digital dikendalikan oleh korporasi swasta yang memiliki kepentingan ekonomi. Ini mengancam demokrasi karena membatasi ruang deliberatif yang seharusnya netral dan terbuka. Algoritmisasi dan Surveilans: Sistem algoritma dan pengumpulan data masif digunakan untuk mengontrol perilaku pengguna dan menjadikannya sasaran iklan, yang juga dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik (misalnya dalam kasus Cambridge Analytica). Ilusi Partisipasi: Kapitalisme digital menyuguhkan kesan kebebasan dan partisipasi, padahal pengguna sebenarnya dikondisikan oleh logika kapitalisme untuk terus memproduksi nilai lebih bagi platform. Bagi kaum muda, kritik ini menjadi penting karena mereka adalah kelompok yang paling aktif dalam dunia digital dan paling rentan terhadap eksploitasi terselubung. Fuchs mengajak generasi muda untuk menyadari bahwa kebebasan berekspresi dalam dunia digital perlu dibarengi dengan pemahaman struktural terhadap sistem ekonomi-politik yang melandasi teknologi. Fuchs juga menyerukan model alternatif seperti media publik non-komersial, kooperatif digital, dan pengembangan teknologi berbasis prinsip demokratis dan keadilan sosial.

Fuchs menekankan bahwa komunikasi dalam masyarakat kapitalis modern telah menjadi sarana reproduksi kekuasaan dan ideologi dominan. Ia mengkritik bagaimana teknologi komunikasi, termasuk media sosial, berperan dalam memperkuat struktur kapitalisme digital. Fuchs juga menyoroti bagaimana kapitalisme digital menciptakan bentuk baru dari alienasi, di mana individu terpisah dari hasil kerja mereka sendiri. Dalam konteks digital, pengguna media sosial secara tidak sadar menghasilkan data dan konten yang dimonetisasi oleh perusahaan teknologi tanpa mendapatkan kompensasi. Hal ini menciptakan ilusi partisipasi dan kebebasan, padahal sebenarnya pengguna dikondisikan oleh logika kapitalisme untuk terus memproduksi nilai lebih bagi platform. Selain itu, Fuchs mengkritik bagaimana algoritma dan surveilans digunakan untuk mengontrol perilaku pengguna dan menjadikannya sasaran iklan, yang juga dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik. Ia menekankan bahwa sistem algoritma dan pengumpulan data masif digunakan untuk mengontrol perilaku pengguna dan menjadikannya sasaran iklan, yang juga dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik. Fuchs juga menyoroti bagaimana kapitalisme digital menciptakan bentuk baru dari alienasi, di mana individu terpisah dari hasil kerja mereka sendiri. Dalam konteks digital, pengguna media sosial secara tidak sadar menghasilkan data dan konten yang dimonetisasi oleh perusahaan teknologi tanpa mendapatkan kompensasi. Hal ini menciptakan ilusi partisipasi dan kebebasan, padahal sebenarnya pengguna dikondisikan oleh logika kapitalisme untuk terus memproduksi nilai lebih bagi platform. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Fuchs menyerukan pengembangan model alternatif seperti media publik non-komersial,

kooperatif digital, dan teknologi berbasis prinsip demokratis dan keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik kritis berbasis media untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran struktural terhadap sistem ekonomi-politik yang melandasi teknologi.

Dalam konteks ini, kaum muda sebagai agen demokrasi digital perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi dalam dunia digital harus dibarengi dengan pemahaman struktural terhadap sistem ekonomi-politik yang melandasi teknologi. Dalam konteks digital, pengguna media sosial secara tidak sadar menghasilkan data dan konten yang dimonetisasi oleh perusahaan teknologi tanpa mendapatkan kompensasi. Hal ini menciptakan ilusi partisipasi dan kebebasan, padahal sebenarnya pengguna dikondisikan oleh logika kapitalisme untuk terus memproduksi nilai lebih bagi platform.

Selain itu, Fuchs mengkritik bagaimana algoritma dan surveilans digunakan untuk mengontrol perilaku pengguna dan menjadikannya sasaran iklan, yang juga dapat dimanipulasi untuk

kepentingan politik. Ia menekankan bahwa sistem algoritma dan pengumpulan data masif digunakan untuk mengontrol perilaku pengguna dan menjadikannya sasaran iklan, yang juga dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Fuchs menyerukan pengembangan model alternatif seperti media publik non-komersial, kooperatif digital, dan teknologi berbasis prinsip demokratis dan keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya pendidikan politik kritis berbasis media untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran struktural terhadap sistem ekonomi-politik yang melandasi teknologi. Kaum muda sebagai agen demokrasi digital perlu menyadari bahwa kebebasan berekspresi dalam dunia digital harus dibarengi dengan pemahaman struktural terhadap sistem ekonomi-politik yang melandasi teknologi. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada transformasi partisipasi politik digital yang lebih adil dan demokratis. Fuchs juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan inklusif. Ia percaya bahwa melalui upaya bersama, masyarakat dapat membangun infrastruktur digital yang mendukung partisipasi demokratis dan keadilan sosial.

Dalam *Communication and Capitalism: A Critical Theory*, Fuchs menjelaskan bahwa bentuk produksi dalam kapitalisme digital menciptakan "struktur komunikasi yang tidak setara", di mana sebagian kecil aktor (pemilik platform) memegang kendali atas infrastruktur komunikasi dan memperoleh surplus ekonomi dari kerja sosial digital yang dilakukan oleh banyak

pengguna.⁵¹ Ini berarti bahwa meskipun internet terlihat demokratis, secara struktural ia mencerminkan ketimpangan ekonomi yang mendalam. Fuchs juga mengkritik logika komodifikasi dalam media sosial, di mana segala bentuk interaksi manusia termasuk afeksi, emosi, dan ekspresi identitas diubah menjadi data yang dapat dijual. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk "komodifikasi kehidupan sosial" yang meluas.⁵² Dalam kerangka ini, kapitalisme digital tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja, tetapi juga menyerap nilai dari kehidupan sehari-hari itu sendiri. Artinya, bahkan bentuk partisipasi yang tampaknya bebas dan sukarela dari pengguna digital tetap berada dalam cengkeraman sistem ekonomi yang memonetisasi interaksi tersebut demi keuntungan maksimal. Melihat lebih jauh lagi bahwa, Fuchs juga memberikan perhatian terhadap bagaimana kapitalisme digital memperkuat kontrol ideologis. Dengan menguasai aliran informasi, perusahaan teknologi memiliki kemampuan untuk mengarahkan wacana publik, menyebarkan nilai-nilai neoliberal, dan membentuk persepsi masyarakat tentang kenyataan. Dalam hal ini, media digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium dominasi ideologis. Fuchs menekankan bahwa pembentukan opini publik dalam ruang digital sering kali tidak netral, tetapi dipengaruhi oleh logika algoritma dan kepentingan ekonomi pemilik platform.⁵³

Kaum muda yang aktif dalam media sosial perlu menyadari bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai subjek yang terus-menerus dipantau, dianalisis, dan diarahkan. Fuchs menyebut kondisi ini sebagai bentuk baru "panoptikon digital", di mana pengawasan terjadi secara masif, terstruktur, dan tidak disadari. Dalam situasi seperti ini, partisipasi politik yang sehat menjadi sulit tercapai karena adanya tekanan psikologis dan manipulasi struktural yang mengarahkan perilaku publik ke arah tertentu yang menguntungkan elit digital.⁵⁴ Sebagai solusi, Fuchs mendorong pengembangan bentuk media alternatif yang dikelola secara kolektif dan tidak bertujuan komersial. Ia menyarankan pembangunan media berbasis komunitas, koperasi digital, dan dukungan terhadap media publik yang menjunjung prinsip transparansi, demokrasi, dan partisipasi aktif. Bagi Fuchs, perubahan ini memerlukan keterlibatan kritis dari kaum muda sebagai agen transformasi digital yang sadar akan posisi mereka dalam sistem dan mampu mengadvokasi sistem yang lebih adil dan egaliter.⁵⁵

⁵¹ Fuchs, *Communication and Capitalism: A Critical Theory*. Hlm 133

⁵² *Ibid.*, 145

⁵³ *Ibid.*, 175

⁵⁴ *Ibid.*, 221

⁵⁵ *Ibid.*, 230

3.7 Strategi Membangun Partisipasi Politik Digital yang Kritis dan Emansipatoris

Dalam konteks digitalisasi politik, partisipasi kaum muda telah menjadi kekuatan potensial bagi perubahan sosial. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud sepenuhnya jika partisipasi digital yang dilakukan tidak bersifat pasif, dangkal, atau manipulatif. Christian Fuchs menekankan pentingnya membangun bentuk partisipasi politik digital yang kritis dan emansipatoris, yaitu yang mampu mengatasi dominasi kapitalisme digital dan membuka ruang bagi demokrasi substantif yang partisipatif, reflektif, dan transformatif.⁵⁶

Langkah *pertama* dalam membangun partisipasi politik digital yang emansipatoris adalah dengan memperkuat literasi digital kritis. Fuchs berpendapat bahwa kapitalisme digital cenderung menciptakan ilusi kebebasan, padahal dalam kenyataannya, pengguna internet justru menjadi komoditas yang dieksploitasi oleh korporasi teknologi besar seperti *Meta* dan *Google*.⁵⁷ Oleh karena itu, kaum muda perlu dibekali kemampuan untuk memahami bagaimana informasi diproduksi, disebarluaskan, dan dimanipulasi dalam ekosistem digital. Literasi digital kritis tidak hanya menyangkut kemampuan teknis dalam menggunakan media digital, tetapi juga kemampuan analitis untuk mengidentifikasi bias ideologis, kepentingan ekonomi di balik konten, serta struktur kekuasaan yang tersembunyi dalam algoritma. Fuchs menekankan bahwa pendidikan politik digital harus bersifat reflektif dan transformatif, bukan sekadar adaptif terhadap teknologi baru.⁵⁸ Dalam kerangka ini, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil memegang peran penting dalam menyelenggarakan pelatihan, diskusi publik, dan produksi konten yang membebaskan.

Kedua, kolektivitas dan gerakan sosial digital. Strategi penting lainnya adalah penguatan gerakan kolektif berbasis digital yang tidak hanya bersifat klik-aktivisme, melainkan memiliki arah perjuangan ideologis yang jelas. Fuchs menggarisbawahi bahwa media sosial dapat menjadi alat pembebasan jika digunakan secara kolektif untuk membangun kesadaran politik dan

⁵⁶ Christian Fuchs, *Digital Demagogue: Authoritarian Capitalism in the Age of Trump and Twitter* (London: Pluto Press, 2018), 22.

⁵⁷ Cecep Dudung Julianto, "Peningkatan Kemampuan Mahasiswa Memahami Struktur Wacana Melalui Metode Analisis Wacana Kritis Berbasis Literasi Media Sosial," *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6, no. 1 (February 4, 2019): 43–51, <https://doi.org/10.33603/deiksis.v6i1.1905>.

⁵⁸ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction* (London: Sage Publications, 2021), 120.

solidaritas lintas kelas dan identitas.⁵⁹ Artinya, partisipasi politik digital harus bergeser dari model individualistis menuju model partisipatif komunal yang memperjuangkan keadilan sosial. Namun, Fuchs memperingatkan bahwa tanpa kesadaran ideologis yang kuat, gerakan digital mudah direduksi menjadi gaya hidup atau branding politik, kehilangan kekuatan transformasi strukturalnya.⁶⁰ Oleh karena itu, aktivisme digital harus dilengkapi dengan pengorganisasian yang berkelanjutan dan berorientasi pada perubahan sosial nyata.

Ketiga, infrastruktur alternatif dan platform demokratis. Membangun infrastruktur digital alternatif merupakan strategi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan. Fuchs mengusulkan perlunya pembangunan platform digital publik yang tidak didasarkan pada logika komersial kapitalistik, melainkan pada prinsip keterbukaan, transparansi, dan kontrol demokratis.⁶¹ Platform ini dapat berbentuk media sosial publik, forum diskusi daring non-komersial, dan basis data terbuka yang dikembangkan secara kolektif oleh masyarakat sipil.

Di tengah dominasi platform digital privat yang dikendalikan oleh korporasi global, pengembangan teknologi berbasis *open source* dan *peer-to-peer* menjadi bentuk perlawanan struktural terhadap kapitalisme digital.⁶² Dengan demikian, kaum muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktor aktif dalam menciptakan ruang digital yang lebih adil dan setara. Langkah ini juga melibatkan kebijakan publik yang mendukung demokratisasi teknologi, seperti perlindungan data pribadi, desentralisasi infrastruktur digital, dan regulasi terhadap dominasi platform besar. Dengan cara ini, partisipasi digital tidak lagi dibatasi oleh logika pasar, melainkan diarahkan pada kepentingan kolektif dan pemberdayaan masyarakat.

4. Simpulan

Partisipasi politik generasi muda di era digital merupakan fenomena yang semakin menentukan arah demokrasi kontemporer. Teknologi digital, khususnya media sosial, telah menjadi arena baru tempat kaum muda mengekspresikan aspirasi, menyuarakan kritik, dan membangun jaringan solidaritas politik. Dalam konteks ini, Christian Fuchs menawarkan kerangka kritis yang menyoroti dinamika kekuasaan, ideologi, dan ekonomi politik di

⁵⁹ Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*, 189.

⁶⁰ Christian Fuchs, *Digital Demagogue: Authoritarian Capitalism in the Age of Trump and Twitter*, 88.

⁶¹ Christian Fuchs, *Digital Capitalism: Media, Communication and Society* (London: Routledge, 2020), 211.

⁶² R.Firdaus Wahyudi et al., "Ruang Publik, Media Sosial, Demokrasi, Dan Pendekatan Kritis," *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (October 31, 2024): 17–32, <https://doi.org/10.47435/retorika.v6i2.3140>.

balik partisipasi digital. Fuchs menegaskan bahwa demokrasi digital sejati tidak cukup diwujudkan hanya dengan keterlibatan dalam platform *daring*, melainkan harus dibangun di atas kesadaran kritis terhadap struktur kapitalisme digital yang membatasi ruang partisipasi itu sendiri. Ia mengingatkan bahwa teknologi bukanlah alat netral, melainkan terikat pada logika komodifikasi dan akumulasi yang sering kali mengaburkan makna demokrasi sejati. Oleh karena itu, kaum muda sebagai agen utama dalam ruang digital dituntut untuk melampaui bentuk-bentuk partisipasi yang pasif, dangkal, atau manipulatif menuju partisipasi yang reflektif, kolektif, dan transformatif.

5. Kepustakaan

Anton, Asif Maulana Muhammad. “Aksi Generasi Digital Yang Berkarakter Dan Toleran.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 SE-Articles (2024): 679–686.

Alamsyah, Diatyka Widya Permata Yasih and Andi Rahman. “The Paradox of Virtual Youth Politics-Inside Indonesia: The Peoples and Cultures of Indonesia.” *Inside Indonesia* 2014. Accessed May 27, 2025, <https://www.insideindonesia.org/the-paradox-of-virtual-youth-politics>.

Brian X. Chen. “‘Posting a Black Square Was Easy. Understanding Why Was Hard,’ 10 Juni 2020.” *The New York Times*, 2020.

Evgeny Morozov. *To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism*. New York: PublicAffairs, 2013.

Fuchs, Christian. *Digital Democracy and the Digital Public Sphere*. London: Routledge, 2023.

———. *Digital Labour and Karl Marx*. London: Routledge, 2014.

———. *Social Media: A Critical Introduction*. London: Sage Publications, 2021.

———. “The Digital Commons and the Digital Public Sphere: How to Advance Digital Democracy Today.” *Christian Fuchs* 1, no. 16 (n.d.): 9–26.

Fachrudin, Achmad. “Hipokrasi Politik Dalam Lanskap Kekuasaan Di Indonesia Anomali Dan Otokritik Demokrasi Digital.” *Jurnal Deliberatif* 1, no. 1 (2024): 36–50.

Fajri, Nurul, Raihal Fajri, Novi Sulisawati, and Helmi Helmi. “Transformasi Politik Di Indonesia: Analisis Terhadap Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik Generasi Muda.” *Journal of Political Sphere* 5, no. 1 (June 30, 2024): 1–13. <https://jurnal.usk.ac.id/JPS/article/view/39517>.

- Fuchs, Christian. *Christian Fuchs, Foundations of Critical Media and Information Studies*. New York: Routledge, 2011.
- Fuchs Christian, *Digital Labour and Karl Marx* New York & London: Routledge, 2014.
- Fuchs Christian, *Social Media: A Critical Introduction* London: SAGE Publications, 2017.
- Fuchs Christian., *Communication and Capitalism: A Critical Theory* London: University of Westminster Press, 2020).
- Jodi. Dean, “Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics,” *Cultural Politics* 1 NO 1 (2005): **DOI:** <https://doi.org/10.1215/17432197-1-1-51> 51–74.
- . *Social Media: A Critical*. London: Sage Publications, 2021.
- Le, Viet Tho, Tuong-Minh Ly-Le, and Lam Ha. “Social Media and Political Participation” (2024): 49–68.
- Morozov Evgeny , *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom* New York: PublicAffairs, 2011.
- Marc Prensky. “Digital Natives, Digital Immigrants,.” *On the Horizon* 9 no. (2001): 1–6.
- Merlyna Lim. “Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia.” *Critical Asian Studies* 52 no 1 (2020): 1–22.
- Pariser Eli, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* New York: Penguin Press, 2011.
- Peter Dahlgren. *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Runciman, David. Ter. Toni Setiawan. *Politik Muka Dua (Topeng Kekuasaan Dari Hobbes Hingga Orwell)*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Shoshana Zuboff. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs, 2019.
- Shubhangi Jain. “The Impact of Social Media Content on Gen Z Engagement: A Comprehensive Analysis.” *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 4 (August 15, 2024). <https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=26194>.
- Siregar, Lisa. “Fight for Your Freedom: Indonesian Online Civic Space under

- Siege.” *The Jakarta Post*,. Last modified 2020. Accessed May 27, 2025. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/27/fight-for-your-freedom-indonesian-online-civic-space-under-siege.html>.
- Siti Aisah. ““Aktivisme Digital Mahasiswa Dalam Gerakkan #ReformasiDikorupsi.”” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* Vol. 3 No. (2020): 134–50.
- Wahyuningroem, Sri Lestari, Rheinhard Sirait, Uljanatunnisa Uljanatunnisa, and Dudy Heryadi. “Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw.” *F1000Research* 12 (April 25, 2024): 543. <https://f1000research.com/articles/12-543/v3>.
- Yusra, Kamaludin, Nuriadi Nuriadi, Amrullah Amrullah, and Yuni Budi Lestari. “Structure and Features of Politically-Invested Hoaxes.” In *Proceedings of the 1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)*. Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://www.atlantis-press.com/article/125943818>.
- Wahyuningroem, Sri Lestari, Rheinhard Sirait, Uljanatunnisa Uljanatunnisa, and Dudy Heryadi. “Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw.” *F1000Research* 12 (April 25, 2024): 543. <https://doi.10.12688/f1000research.122669.3>.
- Yannis Theocharis and Jan W. van Deth. *Political Participation in a Changing World: Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Citizen Engagement*. New York: Routledge, 2017.
- Zeynep Tufekci. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. New Haven: Yale University Press, 2017.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs, 2019